

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai keberadaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan baik dari sisi pengertian, dasar hukum yang menjadi landasan penyusunannya, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya baik yang berskala nasional maupun daerah, sistematika penyusunannya serta maksud dan tujuan disusunnya dokumen ini. Secara lebih jelas disampaikan dalam sub bab berikut.

### **1.1. Latar Belakang**

Renstra SKPD merupakan pengejawantahan lebih detil dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dalam hal ini adalah dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017. Dalam RPJMD 2012-2017 telah ditetapkan visi dan beberapa misi utama dari Pimpinan Daerah terpilih, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan industrialisasi sektoral. Secara umum langkah-langkah pencapaian yang harus ditempuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut sudah tergambar di dalam RPJMD. Namun, langkah-langkah dimaksud perlu mendapat petunjuk-petunjuk lebih teknis yang secara lebih detil disusun dalam bentuk Renstra SKPD.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Renstra SKPD merupakan `Benang Merah` derap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap 5 (lima) tahun ke depan baik dari sisi pembangunan Fisik Sarana Prasarana, pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan Kapasitas Kelembagaan, pengelolaan Lingkungan Hidup lengkap dengan masing-masing Indikator Pembangunannya serta metode Monitoring Evaluasinya.

Renstra SKPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi sektoral yang diembannya. Dalam hal ini, penyusunan Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 ke depan diarahkan kepada pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konstituen ataupun objek pembangunannya adalah masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat Kelautan dan Perikanan tersebut antara lain adalah nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, masyarakat pengawas dan masyarakat pesisir.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disusun melalui proses `kristalisasi` program dan kegiatan yang berasal dari masing-masing bidang dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program dan kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta masukan dan saran dari UPT Pusat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan supervisi dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI). Proses ini diperlukan demi sinkronisasi program dan kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi merupakan fasilitator yang menjembatani kebutuhan daerah dan arah kebijakan pembangunan umum dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi mengambil dua peranan di dalam sistem pembangunan nasional, yaitu sebagai Pembina pembangunan di daerah (fungsi Desentralisasi) serta pelaksana pembangunan program pusat di daerah (fungsi Dekonsentrasi).

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya seperti :

- a) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sesuai dengan PERPRES No. 05 tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010.
- b) RENSTRA KKP RI (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan), sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tanggal 18 Februari 2010.
- c) RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025, sesuai dengan Perda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 13 tahun 2007
- d) RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017, sesuai dengan Perda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 6

Tanggal 26 November tahun 2012, Lampiran Lembaran Daerah No. 2 Seri E.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Berdasarkan RPJMN, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini dititikberatkan pada beberapa prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan seperti Reformasi Birokrasi, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Sedangkan berdasarkan RENSTRA KKP RI, maka secara lebih spesifik Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akan diarahkan kepada pembangunan bidang kelautan dan perikanan melalui program pengembangan minapolitan, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha perikanan, pengembangan jaringan kerja dan informasi, pengembangan teknologi tepat guna serta pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Jika dihubungkan keterkaitan antara RPJPD dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini akan bersinergi pada beberapa program kegiatan penting, yaitu pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. Khusus pengembangan ekonomi lokal, Pemerintah Provinsi melalui RPJPD telah menetapkan 16 (enam belas) arah pembangunan dimana ada dua arah pembangunan yang sangat bersentuhan langsung dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu arah pembangunan nomor 8 (delapan) dan nomor 10 (sepuluh), yaitu:

- (Arah pembangunan ekonomi lokal RPJPD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2005-2025 nomor 8): Pembangunan perikanan terutama perikanan laut diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang wilayahnya dibatasi oleh laut. Di samping akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan serta memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat maka pembangunan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi sehingga mampu untuk diekspor dan

meningkatkan penerimaan daerah. Pembangunan sektor perikanan ini melalui peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (jika memungkinkan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai. Kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di zona ekonomi eksklusif terus diintensifkan untuk menjamin pendapatan optimal petani ikan dan nelayan serta meningkatkan pendapatan.

- (Arah pembangunan ekonomi lokal RPJPD Pemerintah Provinsi Kep. Bangk Belitung 2005-2025 nomor 10): Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan dengan terlebih dahulu membangun fondasi kegiatannya yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Fondasi tersebut dibangun dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas (*Metrology, Standardization, Testing, and Quality/MSTQ*); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Selain itu, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini harus menyesuaikan dengan tata letak dan tata spasial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dalam kerangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan yang telah tergambarkan di dalam dokumen tata ruang RTRW Provinsi. Konsep dasar pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan kepada pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone management and planning*), hal ini dilakukan

untuk mewujudkan keserasian, kolaborasi harmonis, dan sinergis, antara kepentingan ekonomi (*economic sight*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), serta pemeliharaan lingkungan hidup (*environmental conservation*) dalam suatu kelembagaan yang terpadu (*institution integrated*).

Berkaca pada dokumen-dokumen perencanaan di atas, maka secara umum dapat dinyatakan bahwa renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat menetapkan langkah-langkah kebijakan strategis pembangunan fisik maupun non fisik bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seperti meningkatkan taraf hidup nelayan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang ada.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen petunjuk pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang bersifat lima tahunan atas visi dan misi Pimpinan Daerah terpilih yang tertera pada RPJMD. Sedangkan untuk pelaksanaan tiap tahunnya didasarkan pada RKT (Rencana Kerja Tahunan) SKPD yang merupakan bagian dari dokumen Renstra yang ada. Di dalam dokumen RKT SKPD ini telah tergambar detail kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. RKT diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang bersifat dinamis dan perlu penyesuaian-penyesuaian di dalam pelaksanaannya.

#### **1.4. Sistematika Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dokumen Renstra ini terdiri atas 6 (enam) bab dan beberapa sub bab di dalamnya. Masing-masing bab dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

##### Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

### Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

### Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

### Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

#### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah sebagai cerminan dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan lima tahunan ke depan. Sebagai cerminan, Renstra ini memberikan gambaran program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran kegiatan dan pagu dana yang diperlukan untuk mencapai target

yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, dokumen ini menjadi pegangan pimpinan daerah untuk menilai kinerja dari pejabat pelaksana yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan, baik dari tingkat eselon IV (Kasi ataupun Kasubbag), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang ataupun Kepala UPTD) dan eselon II (Kepala Dinas).

Penilaian kinerja dapat dilakukan karena Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan menurut bidang konsentrasinya. Bidang kesekretariatan berfungsi sebagai pendukung manajemen dan teknis lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Bidang perikanan tangkap berkonsentrasi mengembangkan perikanan tangkap. Bidang perikanan budidaya berkonsentrasi mengembangkan perikanan budidaya. Bidang bina usaha dan pemasaran berkonsentrasi mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Bidang kelautan dan pengawasan berkonsentrasi mengelola keberlangsungan Sumber Daya Hayati Lautan dan mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ada.

Selain itu tiap-tiap UPTD juga bertanggung jawab terhadap target produksi dan pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi konsentrasinya. BBIS (Balai Benih Ikan Sentral) bertanggungjawab terhadap produksi benih ikan air tawar dan pembinaan terhadap pembudidaya perikanan air tawar. BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) bertanggungjawab terhadap produksi benih ikan laut dan pembinaan terhadap pembudidaya perikanan laut. BBU (Balai Benih Udang) bertanggungjawab terhadap produksi benih ikan air payau dan pembinaan terhadap pembudidaya perikanan payau dan LPPMHP (Laboratorium Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan) bertanggung jawab terhadap mutu hasil perikanan dan pembinaan pengolahan produk perikanan dan pengembangan ekspor produk perikanan.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Bab ini memberikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya. Memberikan informasi capaian program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, memberikan informasi hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Secara lebih detil disampaikan dalam sub bab berikut.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dibidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

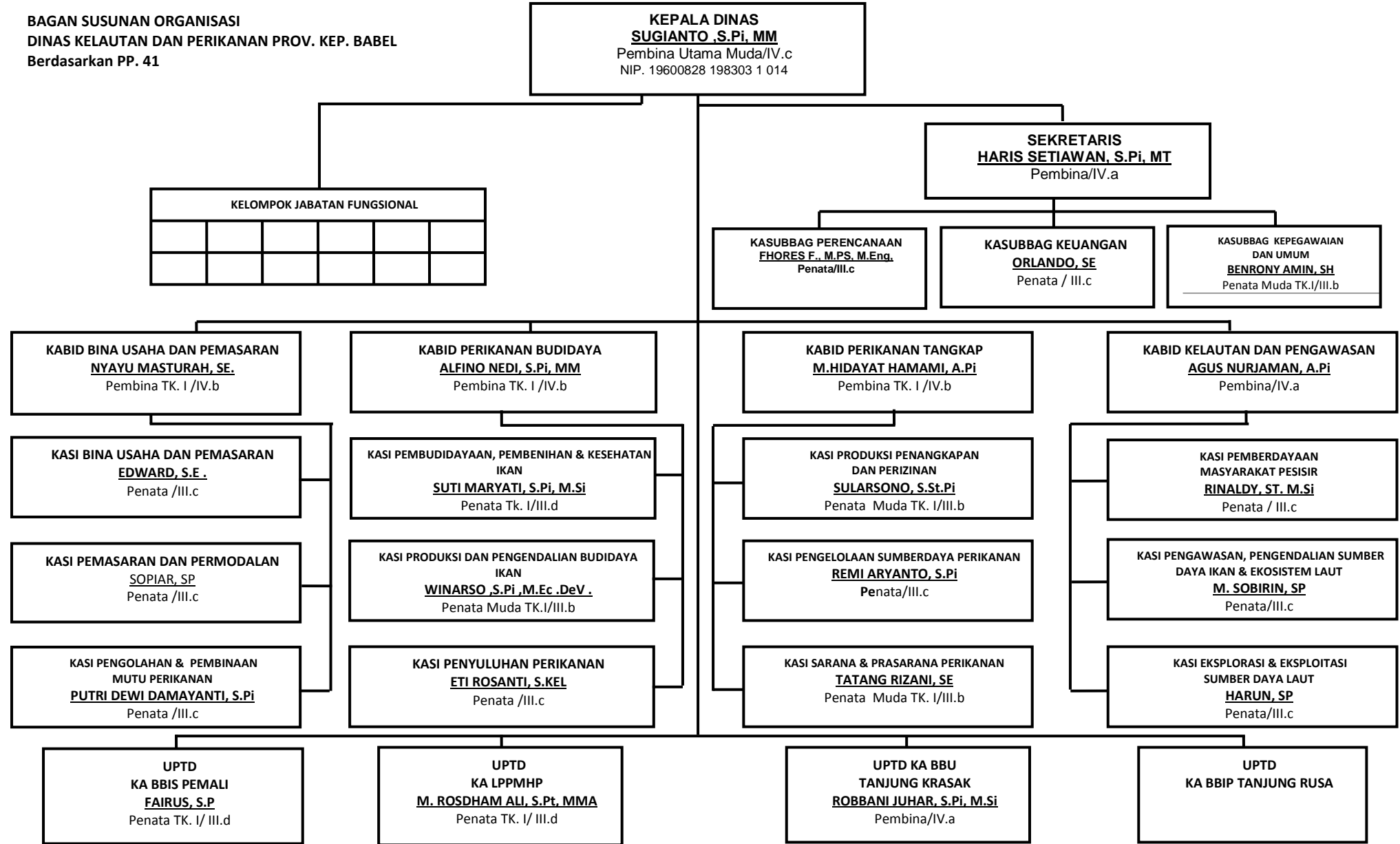
- 1) Menyusun kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan
- 2) Melaksanakan pengaturan administrasi dan teknis bidang Kelautan dan Perikanan
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain
- 4) Melaksanakan pembinaan umum dibidang Kelautan dan Perikanan
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan
- 6) Melaksanakan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota di bidang Kelautan dan Perikanan
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan
- 8) Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha Kelautan dan Perikanan
- 9) Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan
- 10) Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas
- 11) Melaksanakan peningkatan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat serta melaksanakan pengaturan dibidang Kelautan dan Perikanan



12) Melaksanakan pembinaan / pengelolaan kelompok fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada struktur organisasi berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BABEL**  
 Berdasarkan PP. 41



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia dan UPTD yang menunjang keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan sekiranya bisa diberdayakan dengan optimal. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 sebanyak 140 personil dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan THL berdasarkan Status serta Pangkat dan Golongan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011**

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	GOLONGAN										
			II a	II b	II c	II d	III a	II I b	III c	II I d	I V a	I V b	I V c
1	PNS	93	7	5	10	1	33	7	14	8	4	3	1
2	CPNS	17	3		6		8						
	<i>SUB JUMLAH</i>	<i>110</i>											
3	THL PROV	1											
4	THL DINAS	52											
	<i>SUB JUMLAH</i>	<i>53</i>											
	<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Doktoral/ S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana/ S2	10	1	10
3	Sarjana/ S1	36	22	58
4	Diploma-IV	2	0	2
5	Diploma-III	13	5	28
6	Diploma-I/ II			
7	SLTA	16	5	21
8	SLTP	0	0	0
	<b>Jumlah</b>			<b>110</b>

Selain sumber daya manusia yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), Dinas Kelautan dan Perikanan juga didukung oleh keberadaan THL (Tenaga Harian Lepas) yang tersebar baik di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun di UPTD. Dinas Kelautan dan Perikanan juga

didukung oleh 4 (empat) buah UPTD, yaitu Balai Benih Ikan Sentral Pemali Kabupaten Bangka, Balai Benih Ikan Pantai Tanjungrusa Kabupaten Belitung, Balai Benih Udang Tanjungkrasak Kabupaten Bangka Selatan dan Laboratorium Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Baturusa Kota Pangkalpinang. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki 2 (dua) buah kapal pengawas, yaitu Kapal Pengawas Catamaran dan Kapal Pengawas Setuhuk. Keseluruhan sumber daya ini perlu didukung dengan pendanaan operasional yang baik, sehingga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2007-2012 yang hampir berakhir masa berlakunya juga telah menetapkan beberapa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Secara lebih detil dapat disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Target RPJMD**

Aspek/Fokus/ Bidang urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA										% realisasi tahun 2011	interpretasi  Belum Tercapai - Sesuai - Melampaui
	2007		2008		2009		2010		2011			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Peningkatan Produksi Perikanan (ton)	123.136	123.225	126.515	150.558	128.739	153.933	133.245	161.988	136.576	169.621	124,20	Melampaui
Peningkatan Mutu Hasil Perikanan (%)	47	77	49	82	51	85	53	91	55	93	169,09%	Melampaui
Jumlah Konsumsi Ikan per kapita/thn/Kg	33	35	34	36	35	38	36	39,9	37	41	110,81%	Melampaui
Tindak Pidana Perikanan (Jumlah kasus)	37	11	34	9	31	39	28	54	25	23	92,00%	Belum tercapai
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat Bantuan Kredit (kelompok)	50	65	55	70	60	74	65	81	70	85	121,43%	Melampaui
Jumlah Nelayan (orang)	42.453	40.742	42.878	43.356	43.306	43.668	43.739	44.072	44.177	46.276	104,75%	Melampaui
Jumlah Perahu (unit)	13.359	12.880	13.493	15.895	13.628	16.902	13.764	13.848	13.901	14.540	104,60%	Melampaui

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi memajukan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi selaku koordinator di daerah selalu berkoordinasi dengan semua komponen pelaku pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, baik yang berupa UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Unsur Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung tingkat Provinsi yang diadakan tiap tahunnya dengan mengundang PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Sungailiat, PPN Tanjungpandan, Pusat Karantina Ikan Pangkalpinang, Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai wakil dari UPT Pusat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, juga diundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Forum ini berfungsi untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang tergambar di dalam dokumen perencanaan masing-masing instansi, baik pusat maupun kabupaten/kota. Selain mensinkronkan perencanaan ke satu tahun ke depan, isu-isu penghambat tercapainya target pembangunan pada tahun sebelumnya juga mendapat tempat untuk dibahas dan dicarikan solusi bersamanya.

Bentuk bentuk layanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- ✚ Pelayanan bidang kesekretariatan, yaitu menampung usulan proposal kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota maupun Unsur Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- ✚ Pelayanan bidang perikanan tangkap, seperti penerbitan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan hasil perikanan, penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan, penerbitan kartu nelayan, pemulihan sumber daya ikan, peningkatan sarana prasarana

pelabuhan dan bantuan alat penangkapan ikan bagi para nelayan.

- ✚ Pelayanan bidang perikanan budidaya, seperti penyuluhan budidaya yang baik, pembenihan ikan yang baik, kesehatan lingkungan budidaya, penggunaan obat yang tidak dilarang, penyediaan benih (BBIS, BBIP dan BBU), serta pencetakan lahan budidaya yang baru.
- ✚ Pelayanan bidang usaha dan pemasaran, seperti peningkatan kapasitas keuangan pengolah melalui kegiatan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) dan bantuan pemasaran produk produk hasil perikanan.
- ✚ Pelayanan bidang kelautan dan perikanan, seperti pelayanan patroli kapal pengawas perikanan, pemulihan rehabilitasi kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pelayanan informasi penggunaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan Rencana Zonasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan 5 (lima) bidang pelayanan umum yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti dijelaskan pada sub bab 2.4 di atas, semua target indikator yang dicanangkan dalam RPJMD dapat tercapai hampir secara utuh. Namun, masih dirasakan kurang optimal pada pelayanan bidang pengawasan, dimana dukungan terhadap patroli kapal pengawas masih mendapat kendala biaya operasional dan patrolinya.

Selain itu, melihat dukungan pendanaan yang bersifat pembinaan dan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi anggaran yang berasal dari APBN, baik dalam bentuk Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap). Dana APBD belum bisa optimal mendukung program kegiatan pembangunan yang dicanangkan di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2007-2012. Dana APBD masih bersifat dukungan operasional, baik kegiatan operasional kantor Dinas Kelautan dan Perikanan maupun operasional UPTD Dinas dan kapal pengawas.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang visi dan misi tersebut adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dibidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi menyusun kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pengaturan administrasi dan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan koordinasi dengan instansi lain, melaksanakan pembinaan umum dibidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota di bidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pembinaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan, melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas, melaksanakan peningkatan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat serta melaksanakan pengaturan dibidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pembinaan/pengelolaan kelompok fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas Dinas Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa faktor penghambat, namun juga memiliki faktor pendorong yang dapat memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai visi yang sudah ditetapkannya. Faktor penghambat dimaksud berupa:

- Rentang koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di era otonomi daerah ini.
- Konflik kepentingan antar sektor, yaitu antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan, khususnya di wilayah laut dan pesisir.
- Belum optimalnya dukungan dana yang dialokasikan pada sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi utama

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Masih belum optimalnya penempatan sumber daya manusia yang sesuai latar belakang pendidikan pada dinas teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan.

Namun, dibalik faktor-faktor penghambat tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga didorong oleh beberapa faktor utama seperti:

- Sumber daya laut yang besar, secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 80% wilayah perairan dan hanya 20% wilayah daratan.
- Posisi geostrategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta berada pada jalur ALKI I.
- Secara institusi sudah tersedia dinas pada setiap Kabupaten/Kota yang ikut membantu menangani pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini disamping keberadaan UPT Pusat, seperti PPN Sungailiat, PPN Tanjungpandan, Pusat Karantina Ikan Pangkalpinang dan Satker Pengawas Perikanan Bangka.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang bidang kelautan dan perikanan pada setiap institusi kelautan dan perikanan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Dukungan kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan baik dari tingkat Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/MEN/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014, maka beberapa telaahan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan visi Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015 dan dengan misi mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan memiliki tujuan memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi,



mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan dan memperluas akses pasar domestik dan internasional. Renstra ini memiliki 4 (empat) arah kebijakan, yaitu:

1. ***Pro poor***

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. ***Pro job***

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

3. ***Pro growth***

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. ***Pro sustainability***

Pendekatan *pro-sustainability* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui ***Pengembangan Minapolitan, Entrepreneurship, Networking, Technology and Innovation, Empowering dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat.*** Strategi ini diwujudkannyatakan di dalam program dan kegiatan. Renstra KKP RI ini terdiri atas 9 (Sembilan) program yang masing-masing program terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
- 3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP dan
- 9) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan bahwa salah satu isu strategis yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan adalah besarnya **Potensi perikanan** yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diperkirakan sebesar 3,6 juta ton/tahun, namun **belum terkelola secara baik dan optimal**.

Penanganan isu strategis tersebut di atas akan dilakukan melalui **Pengembangan industri perikanan hulu-hilir & kelautan**. Sesuai dengan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mewujudkan industri kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi kerakyatan tahun 2017, maka telah didapatkan kesesuaian visi antara Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di dalam rumusan tujuannya, dokumen RTRW telah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan **Mewujudkan tata ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu dan Berimbang berbasis Agro-Bahari serta ditunjang kegiatan Wisata dan Pertambangan yang Berkelanjutan**.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-Isu Strategis yang akan dijawab melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun ke depan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu isu strategis bidang ekonomi dan isu strategis bidang lingkungan hidup. Dua bidang ini menjadi konsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan mengingat kedua

fungsi ini harus disinergikan dengan baik. Target secara ekonomi dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan yang ada.

Secara lebih detail, isu strategis bidang ekonomi terkonsentrasi pada kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, peningkatan tingkat konsumsi ikan, peningkatan jumlah pengolah ikan serta peningkatan nilai tukar nelayan. Sedangkan isu strategis bidang lingkungan hidup secara lebih detil berupa perluasan kawasan konsevasi laut dan perairan, peningkatan jumlah pulau yang dapat dikelola dengan baik serta peningkatan persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas IUU Fishing.

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Setelah menelaah beberapa dokumen perencanaan pada bab terdahulu, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa visi yang akan dicapai melalui Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah **“Terwujudnya Industri Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017.”** Beberapa misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut diatas adalah:

- 1) *Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan*
- 2) *Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap yang Lestari dan Bertanggungjawab*
- 3) *Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya*
- 4) *Meningkatkan Industri produk olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berdaya saing*
- 5) *Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
- 6) *Mengelola dan Memberdayakan Potensi Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- 7) *Mengelola dan Mengembangkan Industri Jasa Kelautan.*

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan**

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang yang tersedia, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan Kelautan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP
- Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan sasaran adalah peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan sasaran adalah peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasaran hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
- Meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran adalah peningkatan persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas *illegal fishing, Unreported & Unregulated (IUU) fishing*
- Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sasaran adalah peningkatan pemanfaatan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari
- Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan industri jasa kelautan di Bangka Belitung dengan sasaran adalah peningkatan pengelolaan dan pengembangan potensi jasa kelautan khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil

### **4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan diatas, maka beberapa strategi dan kebijakan yang perlu diambil untuk mensukseskan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Pembinaan, pengembangan dan peningkatan ketrampilan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat KP dan aparatur KP, strategi yang dilakukan berupa :
  1. Pelatihan dan Penyuluhan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan usaha perikanan skala kecil
  2. Pendidikan, pelatihan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur KP
  3. Penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, strategi yang dilakukan berupa :
  1. Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, pengawakan perikanan
  2. Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
  3. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya, strategi yang dilakukan berupa :
  1. Pembinaan dan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
  2. Pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan ikan
  3. Pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
  4. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan serta pemasaran hasil perikanan, strategi yang dilakukan berupa :
  1. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil
  2. Peningkatan dan pengembangan mutu hasil produksi perikanan

3. Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran hasil produk perikanan
  4. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
- Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, strategi yang dilakukan berupa :
    1. Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
    2. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
  - Peningkatan fasilitasi pengelolaan BMKT, Wisata Bahari, Galangan Kapal dan energi gelombang, strategi yang dilakukan berupa :
    1. Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan BMKT, industri galangan kapal dan wisata bahari di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan, sasaran indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

**Tabel 4. Target Pembangunan Tahun 2012-2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
PROGRAM									
1.	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas	Persentase Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KEGIATAN									
A.	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan								
SUB KEGIATAN									
a.	Penyiapan Dokumen Perencanaan	Perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Dokumen perencanaan jangka menengah, panjang dan program kerja jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
b.	Pelaporan Kegiatan	Pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Dokumen pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
c.	Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
d.	Penunjang Kegiatan Koordinasi Lainnya	Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP	Persentase Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP	65%	75%	80%	85%	90%	90%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
KEGIATAN									
B.	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan								
SUB KEGIATAN									
a.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun Negara	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan	Persentase peningkatan kualitas kerja SDM dan administrasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	85%	90%	95%	98%	100%	100%
b.	Penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan	Pelaporan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	Dokumen pelaporan akuntansi yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
c.	Penyusunan Pertanggung jawaban keuangan	Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik, benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar piñata usahaan (Laporan Keuangan dengan Predikat WTP)	Dokumen Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik, benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar penata usahaan keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
KEGIATAN									
C.	Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP	Terciptanya kelancaran kerja	Meningkatnya kualitas kerja	75%	80%	85%	90%	95%	100%
SUB KEGIATAN									
a.	penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat	Aktivitas pelayanan pengiriman surat dinas	75%	80%	85%	90%	95%	100%
b.	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	kenyamanan dan kelancaran kerja di kantor	tersedianya fasilitas kerja dalam kondisi baik	75%	80%	85%	90%	95%	100%



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PROGRAM									
2.	Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan	1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	158.327	160.228	162.153	164.082	166.035	168.011
			2) Jumlah Pendapatan Nelayan:	3.361.721	3.687.043	4.045.686	4.450.255	4.895.280	5.384.808
			▪ Pendapatan Nelayan Pemilik /Bulan (Rp.)						
			▪ Pendapatan Nelayan Buruh /Bulan (Rp.)	1.710.697	1.877.558	2.062.136	2.268.349	2.495.184	2.744.703
KEGIATAN									
A.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu							
SUB KEGIATAN									
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	1) Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (Kab/Kota)	2	2	1	2	2	1
			2) Jumlah Ekosistem PUD yang teridentifikasi (pulau)		1	1			
			3) Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya (pulau)				1	1	
b.	Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Terwujudnya kapal perikanan di Provinsi Bangka Belitung yg laik laut, laik tangkap, laik simpan dan Alat penangkap ikan yang sesuai SNI	1) Jumlah jenis kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan (Unit)	5	10	9	7	7	7
			2) Jumlah alat penangkap Ikan yang memenuhi standar (unit)	500	1000	900	700	700	700

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
KEGIATAN									
B.	Produksi Penangkapan dan Perizinan								
SUB KEGIATAN									
a.	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya jumlah sertifikat tanah dan keselamatan berlayar bagi nelayan	1) Tanah nelayan tersertifikasi		400 sertifikat	400 sertifikat	400 sertifikat	400 sertifikat	400 sertifikat
			2) Nelayan aman dalam berlayar		350 buah	350 buah	350 buah	350 buah	350 buah
b.	Peningkatan pelayanan perizinan	Pelayanan prima perizinan dalam data kapal, sosialisasi peraturan perikanan dan perizinan ber SOP	1) Nelayan pemilik kapal memiliki Buku kapal Perikanan		50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku
			2) Terfahaminya aturan perikanan di kalangan nelayan		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
			3) Terlaksananya perizinan sesuai prosedur		100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku
c.	Dukungan Pelayanan perizinaan kapal perikanan ukuran 30 - 60 GT	Tersedianya Sarana Penerbitan Perizinan yang ONLINE antara KKP JAKARTA dengan DKP PROV.BABEL	Terealisasinya kewenangan proses perizinan di tingkat Provinsi untuk kapal >30-60 GT		1 Pkt				
d.	Peningkatan SDM nelayan	Meningkatnya SDM Nelayan dalam segi sertifikat kepelautan dan keahlian di bidang penangkapan dan permesinan	1) Kapal perikanan diawaki oleh perwira kapal yang bersertifikat		25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat
			2) Nelayan mampu mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi penangkapan		25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat
			3) Nelayan mampu memperbaiki kerusakan mesin kapal		25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
e.	Pembekalan keselamatan pelayaran nelayan, jalur-jalur penangkapan dan lampu-lampu navigasi	Meningkatnya keselamatan dan pemahaman tentang aturan keselamatan pelayaran	Nelayan memahami prosedur dan aturan keselamatan berlayar		210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang
f.	Diklat cek fisik kapal tingkat Provinsi	Meningkatnya kemampuan cek fisik kapal dan keamanan petugas saat melaksanakan pengukuran kapal	Petugas DKP Kab/Kota bisa melaksanakan tugas pengukuran kapal < 10 GT		20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
			Persentase menurunnya tingkat kecelakaan petugas pengukuran kapal di atas kapal		80%	85%	90%	95%	98%
KEGIATAN									
C.	Usaha dan Prasarana								
SUB KEGIATAN									
a.	Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap	Meningkatkan Kualitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan dan Kelembagaan	Jumlah PPI yang Operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan Perikanan			1	1	1	2
			Jumlah PPI yang meningkat dalam rangka pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan		1	1	1	1	1
			Jumlah PPI yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan		1	1	1	2	2
			Jumlah Pengembangan KUB Perikanan Tangkap yang mandiri dan bankable		3	5	9	12	20
			Jumlah Lokasi Forum KUB Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Bankable		1	2	2	2	1
b.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Terwujudnya PPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang optimal melakukan kegiatan WKOPP dan K3 Pelabuhan Perikanan	Jumlah Peralatan PPI dan Alat Tangkap Ikan yang sesuai SNI (Paket)		3	3	3	5	5
			Asistensi Penyusunan DED PPI di Kabupaten / Kota (lokasi)		1	2	2	1	1

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PROGRAM									
3.	Pengembangan Perikanan Budidaya								
KEGIATAN									
A.	Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan								
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat	1) Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	2.545	4.073	7.740	12.450	22.430	38.140
			2) Jumlah produksi perikanan budidaya air payau	1.044	1.870	3.383	6.080	10.350	18.300
			3) Jumlah produksi perikanan budidaya air laut	2.260	4.290	9.450	23.620	49.350	109.300
b.	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan	Kawasan potensial perikanan budidaya menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankabel	1) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan	7 kelompok	14 kelompok	21 kelompok	28 kelompok	35 kelompok	42 kelompok
			2) Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	21 unit usaha	28 unit usaha	35 unit usaha	42 unit usaha	49 unit usaha	56 unit usaha
KEGIATAN									
B.	Pembudidayaan, Pembenihan dan Kesehatan								
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan Sistem Pembenihan	Terpenuhinya kebutuhan benih yang bermutu untuk produksi dan terwujudnya sertifikasi CPIB untuk pembenih ikan	1) Jumlah produksi calon induk/induk unggul	10 rb ekor	20 rb ekor	60 rb ekor	180 rbu ekor	440 rbu ekor	1 jta ekor
			2) Jumlah produksi benih bermutu yang tersedia	2,6 jt ekor	5,2 jt ekor	10,4 jt ekor	31,2 jt ekor	93 jt ekor	150 jt ekor
			3) Jumlah unit pembenihan yang bersertifikasi CPIB	3 unit	10 unit	17 unit	31 unit	38 unit	73 unit
			4) Jumlah pembudidaya yang bersertifikasi CBIB	38 unit	72 unit	144 unit	288 unit	350 unit	700 unit

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
b.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	Terpantaunya penyebaran hama dan penyakit ikan di Provinsi Babel, serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan dan tersedianya data kualitas air budidaya	1) Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di Babel	2 jenis	1 jenis	0	0	0	0
			2) Menurunnya persentase pencemar perairan perikanan budidaya	80%	60%	40%	20%	0%	0%
			3) Tersedianya mobil kesling		1 Unit	3 Unit	10 Unit		
			4) Terdirinya bangunan lab. Kesling			50%	75%	90%	100%
c.	Pengembangan Sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan dan termanfaatkannya UPTD bagi pembudidaya ikan	1) Persentase Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan	30%	50%	60%	80%	100%	100%
			2) Persentase termanfaatkannya UPTD bagi pembudidaya ikan di Provinsi Kep. Babel		50%	60%	80%	100%	100%
KEGIATAN									
C.	Penyuluhan Perikanan								
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan yang berwawasan IPTEK	1) Persentase Jumlah Tenaga Penyuluh Terampil	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			2) Persentase Kinerja Penyuluh yang Optimal	75%	80%	85%	90%	95%	100%
b.	Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan	1) Persentase Jumlah DOP Penyuluh	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			2) Persentase Jumlah sarana dan prasarana pendukung penyuluhan	75%	80%	85%	90%	95%	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
PROGRAM									
4.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan	Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah ragam produk ekspor, nilai ekspor/volume ekspor serta jumlah impor terkendali sesuai standar dan kebutuhan						
KEGIATAN									
A.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi bidang P2HP dan jumlah UPI yang memenuhi standar ketenagakerjaan	Jumlah unit usaha P2HP yang memenuhi standar ketenagakerjaan yang kompeten dan kapable	unit	unit	unit	unit	unit	unit
SUB KEGIATAN									
a.	Temu Bisnis Peluang Usaha dan Investasi P2HP	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	Jumlah investasi dibidang P2HP	1	1	1	1	1	1
b.	Rekrutmen KKMB	Tersedianya KKMB yang memiliki kemampuan dalam mendampingi UMKM di Kabupaten/Kota	Jumlah KKMB yang dibina dan dikembangkan	7 orang	14 orang	21 orang	25 orang	30 orang	35 orang
c.	Temu Koordinasi UMKM, KKMB dan Perbankan	Meningkatnya UMKM yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan	Jumlah kredit yang difasilitasi KKMB	0,7 milyar	1 milyar	1,2 milyar	1,4 milyar	1,5 milyar	1,6 milyar
d.	Pembinaan PUMP-P2HP	Meningkatnya kompetensi Poklhasar dalam mengembangkan usaha P2HP	Jumlah Poklhasar yang meningkat kompetensi usahanya	14 Poklhasar	21 Poklhasar	25 Poklhasar	30 Poklhasar	37 Poklhasar	40 Poklhasar
KEGIATAN									
B.	Fasilitasi Pemasaran dan Permodalan								
SUB KEGIATAN									
a.	Forum Bisnis Antar Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Terjalannya Kemitraan Pemasaran, Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Perikanan yang telah dibangun oleh pemerintah melalui peningkatan peran serta para pelaku usaha pemasaran dan Fasilitasi Pelaku Usaha Pemasaran	Pelaksanaan kegiatan forum bisnis	1	1	1	1	1	1



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
KEGIATAN									
C.	Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan								
SUB KEGIATAN									
a.	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin	1) Jumlah Sarana dan Prasaran Pengolahan Hasil Perikanan yang Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan	7 Lokasi	8 Lokasi	9 Lokasi	10 Lokasi	11 Lokasi	12 Lokasi
			2) Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar mutu hasil perikanan	7 UPI	9 UPI	11 UPI	13 UPI	15 UPI	17 UPI
b.	Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	Berkembangnya produk non konsumsi hasil perikanan yang berdaya saing	1) Jumlah UMKM produk perikanan non konsumsi yang dibina dan dikembangkan	7 lokasi	8 lokasi	9 lokasi	10 lokasi	11 lokasi	12 lokasi
			2) Lokasi Promosi dan Jaringan Pemasaran Ikan Hias	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi











NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
b.	Pendayagunaan Pesisir dan lautan	1) Pelaporan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	1) Dokumen pelaporan akuntansi yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
2) Jumlah luasan kawasan Pesisir yg rusak pulih kembali melalui Transplantasi karang dan Terumbu karang buatan		2) Pulihnya perairan pesisir seluas 20.000 ha	2.000 ha	3.000 ha	5.000 ha	5.000 ha	5.000 ha	2.000 ha	
3) Kawasan lokasi BMKT terpetakan		3) Jumlah BMKT terpetakan di 12 lokasi	2 lok	2 lok	2 lok	2 lok	4 lok	2 lok	
4) Jumlah pulau yg teridentifikasi & terpetakan potensinya secara akurat		4) Jumlah pulau kecil yang teridentifikasi & terpetakan sebanyak 54 pulau	2 pulau	7 pulau	10 pulau	15 pulau	20 pulau	2 pulau	

**Tabel 5. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2012 - 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL</b>		<b>3.993</b>	<b>28.873</b>	<b>38.318</b>	<b>43.468</b>	<b>49.937</b>	<b>54.266</b>	<b>218.854</b>
PROGRAM								
1.	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	377	566	727	936	1.096	1.256	4.958
KEGIATAN								
A.	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan	350	500	651	850	1.001	1.151	4.503
SUB KEGIATAN								
a.	Penyiapan Dokumen Perencanaan	100	143	186	243	286	329	1.287
b.	Pelaporan Kegiatan	20	29	37	49	57	66	258
c.	Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan	80	114	149	194	229	263	1.029
d.	Penunjang Kegiatan Koordinasi Lainnya	150	214	279	364	429	493	1.929
KEGIATAN								
B.	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan	-	38	46	54	62	70	270
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun Negara	-	10	15	20	25	30	100
b.	Penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan	-	25	27	29	31	33	145
c.	Penyusunan Pertanggung jawaban keuangan	-	3	4	5	6	7	25
KEGIATAN								
C.	Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP	26,8	28,4	30,0	31,6	33,2	34,8	184,8
SUB KEGIATAN								
a.	penyediaan jasa surat menyurat	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	19,8
b.	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25	26	27	28	29	30	165

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PROGRAM								
2.	Pengembangan Perikanan Tangkap	400	5.880	11.060	11.085	11.485	10.855	50.765
KEGIATAN								
A.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	400	2.350	8.050	7.975	7.675	7.225	33.675
SUB KEGIATAN								
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	400	1.400	1.400	1.225	1.225	775	6.425
b.	Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	-	950	6.650	6.750	6.450	6.450	27.250
KEGIATAN								
B.	Produksi Penangkapan dan Perizinan		1.595	1.495	1.595	1.495	1.595	7.775
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan		500	500	500	500	500	2.500
b.	Peningkatan pelayanan perizinan		100	100	100	100	100	500
c.	Dukungan Pelayanan perizinaan kapal perikanan ukuran 30 - 60 GT		75	75	75	75	75	375
d.	Peningkatan SDM nelayan		400	400	400	400	400	2.000
e.	Pembekalan keselamatan pelayaran nelayan, jalur-jalur penangkapan dan lampu-lampu navigasi		420	420	420	420	420	2.100
f.	Diklat cek fisik kapal tingkat Provinsi		100		100		100	300
KEGIATAN								
C.	Usaha dan Prasarana		1.935	1.515	1.515	2.315	2.035	9.315
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap		915	595	595	595	515	3.215
b.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Alat Penangkap Ikan		1.020	920	920	1.720	1.520	6.100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)					TOTAL ALOKASI	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
PROGRAM								
3.	Pengembangan Perikanan Budidaya	-	7.430	9.125	11.550	14.800	17.179	60.084
KEGIATAN								
A.	Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan		4.190	5.280	6.900	7.910	9.350	33.630
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan		850	1.070	1.670	1.830	2.040	7.460
b.	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan		3.340	4.210	5.230	6.080	7.310	26.170
KEGIATAN								
B.	Pembudidayaan, Pembenihan dan Kesehatan		2.708	3.249	3.869	4.782	6.033	20.641
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan Sistem Pembenihan		58	69	89	125	188	529
b.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan		450	540	612	856	1.284	3.742
c.	Pengembangan Sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan		2.200	2.640	3.168	3.801	4.561	16.370
KEGIATAN								
C.	Penyuluhan Perikanan		532	596	781	2.108	1.796	5.813
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan		471	524	475	671	412	2.551
b.	Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan		62	72	307	1.437	1.385	3.262



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PROGRAM								
4.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	3.216	6.730	7.256	8.651	10.052	10.954	46.859
KEGIATAN								
A.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistim Usaha dan Investasi Perikanan	836	1.000	1.271	1.494	1.720	1.954	8.275
SUB KEGIATAN								
a.	Temu Bisnis Peluang Usaha dan Investasi P2HP	76	80	88	96	105	115	560
b.	Rekrutmen KKMB	110	115	122	130	140	154	771
c.	Temu Koordinasi UMKM, KKMB dan Perbankan	600	750	1.000	1.200	1.400	1.600	6.550
d.	Pembinaan PUMP-P2HP	50	55	61	68	75	85	394
KEGIATAN								
B.	Fasilitasi Pemasaran dan Permodalan	2.380	3.580	3.780	4.885	5.990	6.590	27.205
SUB KEGIATAN								
a.	Forum Bisnis Antar Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	200	200	200	200	200	200	1.200
b.	Pengembangan data dan informasi hasil perikanan ( warta pasar ikan)	50	50	50	50	50	50	300
c.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran dalam negeri	750	900	1.000	1.000	1.000	1.000	5.650
d.	Lomba masak serba ikan dan pameran	200	250	300	400	500	600	2.250
e.	Kampanye GEMARIKAN Dan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Baku Ikan (PMTAS)	150	150	200	200	200	200	1.100
f.	Pemantauan Hasil Eksport	30	30	30	35	40	40	205
g.	Pengadaan peralatan pemasaran hasil perikanan	1.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.500	16.500
KEGIATAN								
C.	Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan		2.150	2.205	2.272	2.342	2.410	11.379
SUB KEGIATAN								
a.	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan		1.930	1.965	2.013	2.061	2.110	10.079
b.	Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi		220	240	259	281	300	1.300

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PROGRAM								
5.	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan	-	8.267	10.150	11.246	12.504	14.022	56.189
KEGIATAN								
A.	Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Laut		1.805	2.660	3.560	4.440	5.370	17.835
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan;		550	700	850	1.000	1.150	4.250
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan		750	1.150	1.550	1.950	2.400	7.800
c.	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan		200	300	400	500	600	2.000
d.	Pembentukan kelompok pokmaswas		105	210	335	440	545	1.635
e.	Peningkatan kualitas SDM pengawasan		150	200	275	350	425	1.400
f.	Dukungan manajemen dan administrasi dan dukungan teknis lainnya Ditjen PSDKP		50	100	150	200	250	750
KEGIATAN								
B.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		3.911	4.011	3.461	3.561	3.011	17.954
SUB KEGIATAN								
a.	Pelayanan usaha dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;		1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	6.304
b.	Pembangunan Kedai Pesisir		1.000	1.500	1.000	500	500	4.500
c.	Pembentukan Kelompok Masy. Pencinta Lingkungan Pesisir		300	400	300	400	300	1.700
d.	Penyusunan Database dan Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		500	-	-	500	-	1.000
e.	Bimbingan Teknis PUMP/KUB Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil		150	150	200	200	250	950
f.	Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna bagi Industri Rumah Tangga Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.		700	700	700	700	700	3.500
KEGIATAN								
C.	Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut		2.551	3.479	4.226	4.503	5.641	20.400
SUB KEGIATAN								
a.	Pengelolaan & pengembangan Konservasi & Jenis		1.360	1.720	1.720	1.720	2.080	8.600
b.	Pendayagunaan Pesisir dan lautan		1.191	1.759	2.506	2.783	3.561	11.800

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara lebih detil disampaikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017**

NO.	RINCIAN	SASARAN						RATA-RATA KENAIKAN (% THN)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>A. FUNGSI EKONOMI</b>								
1.	Produksi Perikanan (ton)							
	▪ Perikanan Tangkap	159.000	161.000	163.000	169.000	175.000	181.000	2,63
	▪ Perikanan Budidaya	35.000	42.000	49.000	56.000	62.000	69.000	14,12
2.	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan	118	119	120	122	125	127	1,48
3.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD juta)	9,36	10,92	13,00	17,37	21,56	24,12	21,07
4.	Konsumsi Ikan (Kg/Kap/th)	42	43	45	47	48	49	3,14
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (Unit)	1.470	1.700	1.980	2.200	2.500	2.800	13,77
<b>B. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1.	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha)	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	12,91
2.	Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dikonservasi (Pulau)	3	7	7	10	12	12	39,24